

POLITIK HUKUM HAK CIPTA UNTUK KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN TIONGKOK

Oleh:

Zhang Yike¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan politik hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis *ius constituendum* hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta dilengkapi dengan melakukan wawancara kepada ahli-ahli di bidang hak cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok memiliki kesamaan dalam tujuan hukum hak cipta dan sama-sama tidak mengakui *Artificial Intelligence* sebagai subjek hak cipta. Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan konsistensi dalam menekankan bahwa kontribusi manusia merupakan syarat utama untuk menentukan orisinalitas suatu karya guna memperoleh perlindungan hak cipta. Perbedaan terletak pada pendekatan Amerika Serikat yang bersifat ketat dalam menetapkan kriteria orisinalitas, sedangkan Tiongkok cenderung lebih fleksibel dengan membuka ruang interpretasi melalui praktik peradilan untuk menentukan orisinalitas karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*. *Ius constituendum* hukum hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* di Indonesia perlu dirumuskan secara adaptif dan kontekstual tanpa harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman pelaksanaan yang menegaskan kontribusi intelektual manusia sebagai syarat orisinalitas dalam karya berbasis *Artificial Intelligence* sebagai alat bantu dalam proses penciptaan.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, Politik Hukum, dan *Ius Constituendum*

¹ Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***LEGAL POLICY OF COPYRIGHT FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE
GENERATED WORKS: A COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA, THE
UNITED STATES, AND CHINA***

By.

Zhang Yike¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the comparative legal policy of copyright law for works generated by Artificial Intelligence in Indonesia, the United States, and China. Additionally, the study seeks to examine the ius constituendum of Indonesian copyright law with regard to AI-generated works.

This research is a normative juridical research, based on the applicable laws and regulations. The research is descriptive-analytical in nature. The data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, complemented by interviews with experts in the field of copyright law.

The findings show that Indonesia, the United States, and China share similarities in terms of copyright law objectives and the shared position that Artificial Intelligence cannot be recognized as a subject of copyright. Both the United States and China demonstrate consistency in emphasizing that human contribution is a fundamental requirement for establishing the originality of a work in order to receive copyright protection. The difference lies in the approach: the United States adopts a strict standard in determining originality, whereas China takes a more flexible stance by allowing interpretive space through judicial practice to assess the originality of works generated with the assistance of Artificial Intelligence. The ius constituendum of Indonesian copyright law for AI-generated works should be formulated in an adaptive and contextual manner without requiring a revision of the Copyright Law. This can be achieved through the development of implementing guidelines that clarify the human intellectual contribution as a requirement for originality in works created using Artificial Intelligence as a tool in the creation process.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Legal Policy, and Ius Constituendum

¹ Graduate Student, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Associate Professor at the Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.